

Katalog: 9302023.5208

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN LOMBOK UTARA MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2013 - 2017



BPS Kabupaten Lombok Utara

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN LOMBOK UTARA MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2013 - 2017



BPS Kabupaten Lombok Utara

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN LOMBOK UTARA
MENURUT PENGELUARAN 2013- 2017**

ISSN : 978 - 902 - 70750 - 5 - 4
Nomor Publikasi : 52080.1805
Katalog BPS : 9302023.5208

Ukuran Buku : 21 x 29 cm
Jumlah Halaman : ix + 87

Naskah:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis

Gambar Kulit:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN LOMBOK UTARA
MENURUT PENGELUARAN 2013- 2017**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Ir. Muhadi

Editor : I Nyoman Budiana, SST
Hasan Basril, SST

Penulis : I Nyoman Budiana, SST
Priagung Rizaldi
Edi Kurniawan, SE
Linda Primasari, A.Md
Lalu Sukroni, SE

Pengolah data : I Nyoman Budiana, SST

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karuniaNya Publikasi “ Produk Domesti Regional Bruto Kabupaten Lombok Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2013 - 2017 ” dapat diselesaikan tepat waktu. PDRB menurut pengeluaran publikasi yang dirilis setiap tahun oleh BPS Kabupaten Lombok Utara melengkapi publikasi lainnya.

Publikasi PDRB menurut pengeluaran memberikan informasi terkait dengan struktur penggunaan nilai tambah yang dilakukan oleh institusi atau pelaku ekonomi. Selain itu juga PDRB menurut pengeluaran juga memberikan informasi terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi ditinjau dari komponen pengeluaran.

Publikasi ini tentunya sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu kami sangat berharap masukan dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas dari publikasi PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Lombok Utara. sebagai penutup kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang sudah memberikan kontribusi dalam penyusunan Publikasi ini

Tanjung, Agustus 2018
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Lombok Utara,

Ir. MUHADI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Pendapatan Regional	2
1.2. Kegunaan Statistik PDRB	5
1.3. Perubahan Tahun Dasar PDRB	7
BAB II	
METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	13
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	14
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	18
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	21
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	25
2.5 Perubahan Inventori	30
2.6 Ekspor dan Impor Barang serta Jasa	35

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN LOMBOK UTARA BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN LOMBOK UTARA TAHUN 2013-2017	37
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Lombok Utara Menurut Pengeluaran	39
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	45
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	50
3.4 Konsumsi Akhir Pemerintah	51
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	53
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	55
3.7 Perkembangan Ekspor Barang	56
3.8 Perkembangan Impor Barang	58
3.9 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	60

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2013-2017	61
4.1 PDRB (Nominal)	62
4.2 Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	64
4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	65
4.4 Perbandingan Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	66
4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	67
4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor	68
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	69
4.8 <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	70
PENUTUP	72
LAMPIRAN	74
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013-2017	39
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013-2017.....	40
Tabel 3	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 – 2017 (persen)	42
Tabel 4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 – 2017 (persen)	43
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017	44
Tabel 6	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017	45
Tabel 7	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017	47
Tabel 8	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017	48
Tabel 9	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017	49
Tabel 10	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017	50
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 - 2017	51
Tabel 12	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017	53
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017	55

Tabel 14	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017	56
Tabel 15	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017	58
Tabel 16	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013–2017	62
Tabel 17	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2013 – 2017	64
Tabel 18	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2013 – 2017	65
Tabel 19	Rasio Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013–2017	66
Tabel 20	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2013 – 2017	67
Tabel 21	Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 – 2017	68
Tabel 22	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017	69
Tabel 23	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> , Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017	71

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 - 2017	41
----------	---	----

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan menjadi hal yang sangat krusial. Data memberikan gambaran yang jelas terhadap target yang akan dicapai dalam pembangunan. Demikian pula setiap tahapan yang akan dilakukan harus berdasarkan data yang tepat sehingga tujuan yang telah ditetapkan tidak keluar dari tujuan akhirnya. Data yang berkualitas akan menentukan kualitas dan seberapa jauh capaian program pembangunan yang diharapkan mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Salah satu data yang sangat dibutuhkan dalam melakukan analisa pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan akumulasi dari keseluruhan kegiatan ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah selama kurun waktu tertentu. PDRB dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu menurut harga berlaku dan menurut harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Hal tersebut tidak hanya mencerminkan perkembangan output produksi tap juga perkembangan harga ditingkat konsumen.

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

- c. **Menurut Pendekatan Pengeluaran**, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.

6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

1.3 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;

- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

¹ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut

digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.

- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPR
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

BAB II
METODE ESTIMASI DAN SUMBER
DATA

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

- \bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
 x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
 n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga
 i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$
 j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) kabupaten mencakup : a. PK-Pemerintah kecamatan yang berada di wilayah kabupaten; b. PK-Pemerintah kabupaten yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah kabupaten; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah kabupaten yang bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P kabupaten Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Kabupaten adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kabupaten itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Kabupaten yang bersangkutan.

b. PK-P Kabupaten adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasikan menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
 - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
 - d. Laporan keuangan perusahaan.
 - e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
 - f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
 - g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
 - h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.

- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

3. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan*.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB *adh Berlaku*. Untuk memperoleh nilai *adh Konstan* adalah dengan *men-deflate* PMTB (*adh Berlaku*) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB *adh Konstan* dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB *adh Konstan* terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB *adh Berlaku*, nilai PMTB *adh Konstan* tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB *adh Konstan* di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB *adh Berlaku* diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke*

dua, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflate perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR IMPOR

i **Pendahuluan**

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii **Konsep dan definisi**

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii **Cakupan**

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Import Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Import Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Import barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Import barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-import jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-import tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III

**TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN
LOMBOK UTARA BERDASARKAN PDRB
PENGELUARAN KABUPATEN LOMBOK
UTARA TAHUN 2013 - 2017**

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

Nilai tambah yang dihasilkan oleh unit produksi yang ada di suatu wilayah akan menjadi konsumsi bagi institusi yang ada di daerah tersebut atau diekspor ke daerah lainnya. Secara umum pola konsumsi yang dilakukan oleh unit ekonomi di Kabupaten Lombok Utara mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan seiring dengan bertambahnya kebutuhan dan kemajuan informasi. Kebutuhan yang terus meningkat akan mendorong unit ekonomi untuk melakukan aktivitas konsumsi. Tak pelak aktivitas tersebut akan menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Lombok Utara.

Umumnya rumah tangga merupakan institusi yang paling besar melakukan konsumsi akhir. Secara tidak langsung hal tersebut mengindikasikan jika permintaan akan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masih cukup besar. Tingginya permintaan ini juga memicu kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara.

Kontribusi tertinggi penyusun PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga memberikan andil hampir sebagian besar dari PDRB Penggunaan. Hal tersebut secara tidak langsung memberikan gambaran jika pendapatan yang diperoleh umumnya lebih banyak digunakan dalam memenuhi kebutuhan untuk konsumsi. Hal tersebut juga didorong oleh semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Lombok Utara yang baru berkembang dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Barat. Secara rinci pola pengeluaran yang dilakukan oleh masing-masing institusi akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya

3.1 TINJAUAN AGEGAT PDRB LOMBOK UTARA MENURUT PENGELUARAN

Perkembangan perekonomian Kabupaten Lombok Utara selama lima tahun mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Indikasi tersebut terlihat dari besaran PDRB yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara umum besaran PDRB Kabupaten Lombok Utara yang dihitung adh berlaku dan adh konstan meningkat cukup signifikan. Secara tidak langsung hal tersebut menggambarkan adanya gairah dari aktifitas perekonomian masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

Capaian Angka PDRB Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2017 adalah Rp 4,34 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, angka PDRB Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 mengalami perkembangan, dimana PDRB 2015 adalah Rp 3,97 triliun. komponen konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang memiliki nilai tertinggi jika dibandingkan dengan komponen lainnya, yaitu mencapai Rp 3.26 triliun.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013-2017

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.566,10	2.772,48	2.955,31	3.104,91	3.261,00
2. Konsumsi LNPRT	30,68	37,29	40,26	43,95	47,92
3. Konsumsi Pemerintah	763,40	973,45	1.065,74	1.119,74	1.200,32
4. PMTB	1.102,95	1.193,59	1.324,56	1.484,95	1.591,69
5. Perubahan Inventori	1,60	11,84	10,46	15,90	16,37
6. Ekspor	605,14	788,01	869,93	937,80	1.046,51
7. Impor	2.153,02	2.527,12	2.648,12	2.740,80	2.818,38
Total PDRB	2.916,86	3.249,53	3.618,13	3.966,45	4.345,43

Sumber : BPS Lombok Utara

**. Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2013-2017**

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.318,57	2.403,33	2.496,37	2.533,32	2.578,99
2. Konsumsi LNPRT	27,38	30,44	32,14	33,92	35,65
3. Konsumsi Pemerintah	673,57	734,92	747,60	752,61	781,62
4. PMTB	946,85	972,85	1.050,68	1.116,18	1.159,68
5. Perubahan Inventori	1,35	9,44	6,33	9,88	10,07
6. Ekspor	559,76	683,39	713,77	760,02	833,94
7. Impor	1.822,81	2.005,53	2.080,23	2.084,38	2.088,61
Total PDRB	2.704,66	2.828,84	2.966,67	3.121,55	3.311,34

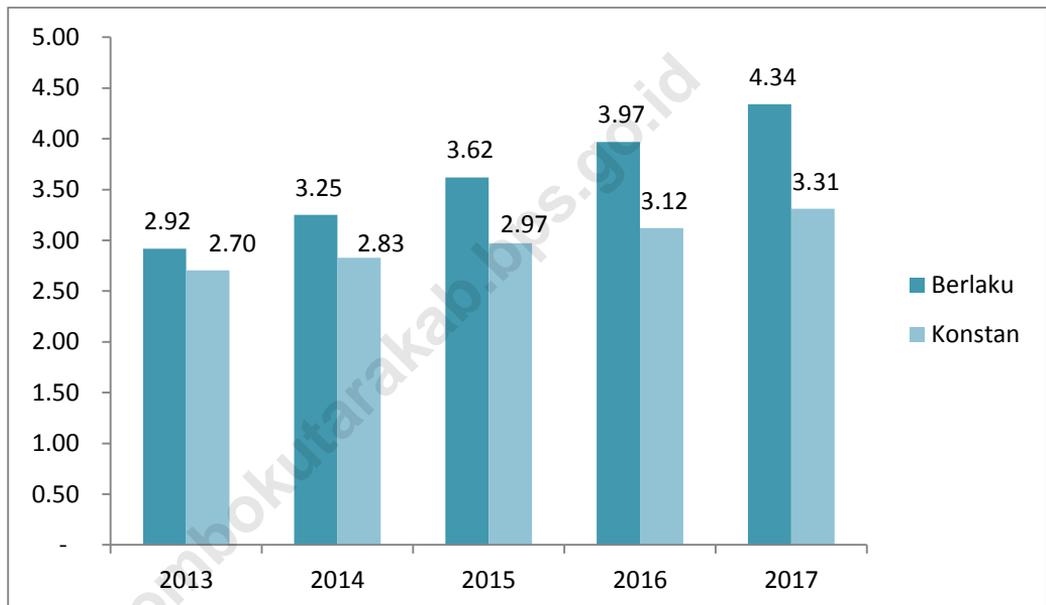
Sumber : BPS Lombok Utara

Laju pertumbuhan ekonomi yang dijadikan acuan dalam melihat perkembangan perekonomian dihitung dari angka PDRB atas dasar harga konstan. Hal tersebut untuk mengeliminasi pengaruh perkembangan harga pada output yang dihasilkan. Untuk itu perhitungan PDRB adalah konstan dianggap bisa mewakili pertumbuhan ekonomi karena pengaruh fluktuasi harga sudah dieliminasi. Saat ini PDRB adalah konstan mengacu pada harga di tahun 2010. Dengan menghitung adalah konstan 2010 maka pengaruh harga dapat dihilangkan..

Sejalan dengan PDRB adalah berlaku perkembangan PDRB adalah konstan Kabupaten Lombok Utara mengalami peningkatan yang cukup baik.. Hal tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di Kabupaten Lombok Utara. Pada tahun 2017 PDRB Kabupaten Lombok Utara

adh konstan 2010 mencapai Rp 3,31 triliun yaitu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai Rp 3,12 triliun.

**Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010
Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 - 2017 (Rp triliun)**



Sumber : BPS Lombok Utara

Tren angka PDRB adh konstan dan adh berlaku memperlihatkan pergerakan yang terus meningkat selama lima tahun terakhir. Secara grafis perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat dari Grafik 1. Berdasarkan grafik 1 terlihat jika perkembangan PDRB adh berlaku meningkat lebih cepat jika dibandingkan dengan adh konstan. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh kenaikan harga yang memicu PDRB adh berlaku meningkat lebih tajam jika dibandingkan dengan adh konstan. Semakin besar gap antara PDRB adh berlaku dan adh konstan menunjukkan jika semakin besar pengaruh kenaikan harga terhadap kenaikan PDRB di Kabupaten Lombok Utara.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2013 – 2017 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	87,97	85,32	81,68	78,28	75,04
2. Konsumsi LNPRT	1,05	1,15	1,11	1,11	1,10
3. Konsumsi Pemerintah	26,17	29,96	29,46	28,23	27,62
4. PMTB	37,81	36,73	36,61	37,74	36,63
5. Perubahan Inventori	0,05	0,36	0,29	0,40	0,38
6. Ekspor	20,75	24,25	24,04	23,64	24,08
7. Impor	73,81	77,77	73,19	69,10	64,86
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Lombok Utara

Jika kita lihat dari sharing komponen PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Lombok Utara mengalami sedikit pergeseran dari tahun ke tahun. Komponen yang memberikan sharing tertinggi disumbangkan oleh komponen konsumsi rumah tangga. Kontribusi komponen konsumsi rumah tangga selama lima tahun terakhir selalu di atas 75 persen. pada tahun 2017 kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 75,04 persen, namun demikian mengalami sedikit penurunan kontribusi jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 78,28.

Komponen lainnya yang memberikan kontribusi cukup tinggi adalah komponen impor. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat masih besarnya ketergantungan barang – barang impor untuk memenuhi kebutuhan di Lombok Utara. Impor merupakan komponen pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Lombok Utara. Pada tahun 2017 kontribusi impor sebesar 64,86 persen. mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 69,10 persen. hal tersebut mengindikasikan adanya pengurangan komoditas impor dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa di Lombok Utara.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2013 – 2017 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,57	3,66	3,87	1,48	1,80
2. Konsumsi LNPRT	6,04	11,17	5,61	5,51	5,13
3. Konsumsi Pemerintah	2,19	9,11	1,73	0,67	3,85
4. PMTB	3,33	2,75	8,00	6,23	3,90
5. Perubahan Inventori	(95,51)	598,35	(32,91)	56,04	1,85
6. Ekspor	(23,93)	(13,36)	4,45	6,48	9,73
7. Impor	(10,32)	(2,26)	3,72	0,20	0,20
Total PDRB	4,11	4,59	4,87	5,22	6,08

Sumber : BPS Lombok Utara

Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan tren yang cukup baik. Dalam kurun lima tahun terakhir angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Utara berkisar pada di atas 4 persen. pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Utara mencapai 6,08 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86 persen atau pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,22 persen.

Secara umum semua komponen PDRB Pengeluaran mempunyai pertumbuhan yang positif di tahun 2017. Komponen pengeluaran rumah tangga pada tahun 2017 mampu tumbuh sebesar 1,80 persen. mengalami percepatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 1,48 persen. komponen yang mampu tumbuh cukup besar adalah komponen ekspor. Pada tahun 2017 komponen ekspor mampu tumbuh sebanyak 9,73 persen.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 - 2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	110,68	115,36	118,38	122,56	126,45
2. Konsumsi LNPRT	112,07	122,51	125,25	129,60	134,42
3. Konsumsi Pemerintah	113,34	132,46	142,55	148,78	153,57
4. PMTB	116,49	122,69	126,07	133,04	137,25
5. Ekspor	118,56	125,39	165,11	160,89	162,59
6. Impor	93,20	115,31	121,88	123,39	125,49
Total PDRB	111,27	126,01	127,30	131,49	134,94

Sumber : BPS Lombok Utara

Dalam penghitungan PDRB perubahan harga tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Indeks Harga Implisit memiliki kecenderungan untuk selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selama lima tahun terakhir indeks implisit cukup stabil yaitu berkisar 100 sampai dengan 130 persen. Pada tahun 2017 indeks implisit PDRB Kabupaten Lombok Utara mencapai 131,23 persen sedangkan pada tahun 2015 indeks harga implisit mencapai 127,07 persen, atau meningkat sekitar 4,16 persen.

Jika ditinjau masing - masing komponen maka komponen perubahan inventori memiliki besar indeks implisit yang paling tinggi. Pada tahun 2017 indeks harga implisit perubahan inventori mencapai 153,57 persen. komponen yang mempunyai indeks implisit terendah adalah komponen pengeluaran rumah tangga. Indeks implisit konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 mencapai 126,45 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 122,56 persen.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.566,10	2.772,48	2.995.31	3.104,91	3.261,01
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.318,57	2.403,33	2.496,38	2.533,32	2.578,99
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	87,97	85,32	81,68	78,28	75,04
Pertumbuhan ²	4,57	3,66	3,87	1,48	1,80
Konsumsi Perkapita (Rp)	12.348.870	13.193.927	14.111.182	14.482.329	15.061.358
Jumlah penduduk (000 org)	207.800	210.133	212.265	214.393	216.515

Sumber : BPS Lombok Utara

Komponen konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap capaian PDRB penggunaan. Hal tersebut tercermin dari besarnya kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Utara. selama lima tahun terakhir komponen konsumsi rumah tangga meningkat cukup signifikan.

Konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 mencapai Rp 3.26 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, konsumsi rumah tangga meningkat sebesar Rp 156 miliar. Senada dengan adh berlaku, komponen pengeluaran adh konstan 2010 juga turut meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 konsumsi rumah tangga mencapai Rp 2,58 triliun meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai Rp 3,10 triliun.

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Tingginya share kompoen konsumsi rumah tangga secara tidak langsung memberikan indikasi jika masih tingginya prioritas terhadap konsumsi jika dibandingkan dengan pengeluaran lainnya. Pada tahun 2017 kontribusi komponen pengeluaran mencapai 75,04 persen mengalami sedikit pengurangan *share* jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 78,28 persen. Umumnya masyarakat yang maju memiliki kontribusi komponen pengeluaran rumah tangga yang rendah jika dibandingkan dengan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang mulai baru berkembang. Mengingat Lombok Utara merupakan kabupaten baru dengan tingkat perkembangan ekonomi yang masih tinggi mencerminkan pola konsumsi masyarakat yang masih tinggi.

Secara umum selama lima tahun terakhir pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga mengalami sedikit fluktuasi. Peningkatan kompoenn konsumsi rumah tangga didukung oleh penambahan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi rumah tangga secara keseluruhan. Peningkatan tersebut kemungkinan juga disebabkan semakin bervariasinya barang kebutuhan rumah tangga. Laju pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 mencapai 1,80 persen. Sedangkan laju pertumbuhan komponen pengeluaran pada tahun 2016 sebesar 1,48 persen.

Konsumsi perkapita mencerminkan besaran nilai komponen konsumsi rumah tangga dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun Kabupaten Lombok Utara. Pada tahun 2017 pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Lombok Utara mencapai Rp 15,06 juta meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai Rp 14,48 juta. Hal tersebut bisa diamini mengingat semakin bertambahnya barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dari waktu ke waktu.

Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017³

Kelompok Konsumsi	(persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	39,20	39,74	39,75	40,34	40,06
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,52	3,49	3,44	3,57	3,60
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	21,74	21,58	22,14	21,94	21,94
d. Kesehatan & Pendidikan	9,80	9,58	9,48	9,90	10,15
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	22,18	22,20	21,72	20,65	20,53
f. Hotel & Restoran	0,14	0,13	0,14	0,14	0,15
g. Lainnya	3,41	3,27	3,33	3,46	3,56
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Lombok Utara

Pola pengeluaran masyarakat Kabupaten Lombok Utara dapat diketahui dari kontribusi dari masing - masing sub kategori penyusun konsumsi rumah tangga. Selama lima tahun terakhir sub komponen pengeluaran untuk makanan, minuman dan rokok masih menjadi yang terbesar alokasi konsumsi rumah tangga. Hal ini mengindikasikan jika kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan makan menjadi prioritas bagi masyarakat Lombok Utara.

Selama lima tahun terakhir komponen makanan, minuman dan rokok mengalami perkembangan yang cukup berfluktuatif. Seiring waktu pola konsumsi masyarakat yang mulai bervariasi, tidak hanya konsumsi makan dan minuman saja. Kontribusi konsumsi makanan, minuman dan rokok pada tahun 2017 mencapai 40,06 persen. Mengalami sedikit penurunan kontribusi jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 40,34 persen.

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

**Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017**

	(Persen)				
Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,92	4,30	4,35	1,34	1,06
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,96	3,76	1,42	2,87	1,98
e. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,57	3,27	4,28	0,87	0,72
f. Kesehatan & Pendidikan	5,06	3,42	2,78	2,82	3,73
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,08	3,50	3,64	1,62	3,04
f. Hotel & Restoran	7,53	3,05	4,05	3,49	5,16
g. Lainnya	6,00	0,07	2,65	0,87	4,23
Total Konsumsi	4,57	3,66	3,87	1,48	1,80

Sumber : BPS Lombok Utara

Laju pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Namun demikian laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mempunyai nilai positif. Secara keseluruhan komponen konsumsi rumah tangga mampu tumbuh di atas 1 persen. Laju pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 mencapai 1,80 persen dimana mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mampu bertumbuh mencapai 1,48 persen. Sub komponen makanan, minuman dan rokok yang menjadi alokasi utama dalam pengeluaran rumah tangga mampu tumbuh 1,06 persen, yaitu mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 1,34 persen. Sub kompone lainnya yang mempunyai pertumbuhan tertinggi adalah sub komponen hotel dan trestoran sebesar 5,16 persen.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017⁴

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	109,36	114,83	117,33	123,44	127,38
b. Pakaian dan Alas Kaki	105,73	109,14	112,92	119,71	124,52
g. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	108,59	112,76	118,23	112,06	127,38
h. Kesehatan & Pendidikan	114,39	116,91	119,98	127,93	132,79
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	113,67	118,74	119,51	117,44	119,00
f. Hotel & Restoran	120,89	123,25	128,33	135,70	140,50
g. Lainnya	115,31	119,40	126,35	136,76	141,71
Total Konsumsi	110,68	115,36	118,38	122,56	126,45

Sumber : BPS Lombok Utara

Perubahan harga sangat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Perkembangan harga di tingkat konsumen ditunjukkan oleh perkembangan indeks harga implisit. . pada tahun 2017 indeks implisit konsumsi rumah tangga mencapai 126,45 yaitu meningkat sebesar 3,89 poin jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Jika ditinjau dari masing masing sub kompoen, maka sub komponen lainnya yang memiliki indeks harga implisit tertinggi dibandingkan dengan sub kompoen lainnya yaitu mencapai 141,71 persen, selanjutnya disusul oleh komponen hotel dan restoran 140,05 persen, hal tersebut kemungkinan terjadi seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas pariwisata di Kabupaten Lombok Urara. Sub komponen makanan, minuman dan rokok mempunyai indkes implisit sebesar 127,38 persen.

⁴ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi LNPRT mencakup konsumsi yang dilakukan oleh lembaga non profit seperti LSM, partai politik, yayasan dan perkumpulan yang tidak mencari keuntungan. Komponen konsumsi LNPRT masih sangat rendah di Kabupaten Lombok Utara. Walaupun tidak berdampak signifikan terhadap pembentukan PDRB menurut pengeluaran namun konsumsi lembaga non profit memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Tercatat selama lima tahun terakhir komponen konsumsi LNPRT berkisar di atas Rp 30 miliar sampai dengan Rp 50 miliar.

**Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	30,68	37,29	40,26	43,95	47,92
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	27,38	30,44	32,14	33,92	35,65
Proporsi terhadap PDRB (%)	1,05	1,15	1,11	1,11	1,10
Laju (%)	6,04	11,17	5,61	5,51	5,13

Sumber : BPS Lombok Utara

Dalam kurun waktu lima tahun perkembangan aktivitas LNPRT mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2017 kontribusi pengeluaran LNPRT mencapai 1.10 persen. Laju pertumbuhan konsumsi LNPRT selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Laju pertumbuhan komponen pengeluaran LNPRT tahun 2017 mencapai 5,13 persen, mengalami sedikit perlambatan laju pertumbuhan jika dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 5,51 persen.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

komponen konsumsi pemerintah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terutama terhadap daerah yang masih berkembang atau baru mekar, seperti Kabupaten Lombok Utara. Semua pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah akan menjadi komponen pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam PDRB menurut pengeluaran. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat pembiayaan akan sangat berdampak terhadap kemajuan daerah yang baru berkembang, terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	763,40	973,45	1.065,74	1.119,74	1.200,32
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	673,57	734,92	747,60	752,61	781,62
Proporsi terhadap PDRB (%)	26,17	29,96	29,46	28,23	27,62
Laju (%)	2,19	9,11	1,73	0,67	3,85

Sumber : BPS Lombok Utara

Selama lima tahun terakhir perkembangan konsumsi pemerintah di Kabupaten Lombok Utara meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2017 konsumsi pemerintah mencapai Rp 1. 20 triliun, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai Rp 1,12 triliun. Hal tersebut secara tidak langsung mencerminkan adanya peningkatan pelayanan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Senada dengan adh berlaku, komponen pengeluaran pemerintah adh konstan juga turut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Besaran komponen konsumsi pemerintah adh konstan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 752,61 miliar yaitu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar Rp 747,60 miliar.

Pengaruh konsumsi pemerintah terhadap PDRB menurut pengeluaran dapat dilihat dari besarnya kontribusi konsumsi pemerintah. Tercatat peranan konsumsi pemerintah pada selama kurun lima tahun mengalami peningkatan. Kontribusi konsumsi pemerintah pada tahun 2017 mencapai 27,62 persen mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 28,23 persen. Besarnya kontribusi konsumsi pemerintah mengingat Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten baru yang terus meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana.

Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi walaupun mengalami tren yang positif. Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tahun 2017 mencapai 3,65 persen. laju pertumbuhan tersebut mengalami percepatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 0,67 persen.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Investasi merupakan salah satu komponen yang memegang peranan yang cukup strategis dalam perekonomian. Perkembangan investasi yang terjadi di suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Komponen PMTB pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁵. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha.

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB (Miliar Rp)					
a. ADHB	1.102,95	1.193,59	1.324,56	1.484,95	1.591,67
b. ADHK	946,85	972,85	1.050,68	1.116,18	1.159,68
Proporsi Terhadap PDRB (%)	37,81	36,73	36,61	37,44	36,63
Laju Pertumbuhan (%)	3,33	2,75	8,00	6,23	3,90
Struktur (%)					
a. Bangunan	69,92	69,05	68,62	69,67	70,60
b. Non Bangunan	30,08	30,95	31,38	30,33	29,40

Sumber : BPS Lombok Utara

Perkembangan komponen PMTB selama lima tahun terakhir cukup baik. Hal tersebut tercermin dari semakin meningkatnya nilai PMTB dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 besaran komponen PMTB yaitu sebesar Rp 1,59 triliun mengalami perkembangan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai Rp 1.48 triliun. Hal senada juga bila komponen PMTB dihitung adh konstan 2010.

⁵ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Share komponen PMTB terhadap PDRB pengeluaran cukup besar. Selama lima tahun terakhir kontribusi PMTB selalu di atas 30 persen. Kontribusi PMTB pada tahun 2017 mencapai 36,63 persen kontribusinya meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 37,44 persen. Besarnya kontribusi PMTB diharapkan bisa menjadi motor penggerak perekonomian di Kabuapten Lombok Utara.

Adanya peningkatan investasi di Kabupaten Lombok Utara diindikasikan dengan laju pertumbuhan komponen PMTB. Laju pertumbuhan PMTB selama lima tahun terakhir berada di atas 2 persen. Laju pertumbuhan PMTB pada tahun 2017 mencapai 3,90 persen. Mengalami perlambatan jika dibandingkan 2016 dengan laju 6,23 persen. Laju pertumbuhan PMTB sangat dipengaruhi oleh adanya pembangunan sarana dan prasarana, pembelian alat alat produksi yang nantinya diharapkan akan meningkatkan produktivitas unit unit ekonomi.

Komponen PMTB terdiri dari dua sub komponen yaitu sub komponen bangunan dan non bangunan. Secara umum sub komponen bangunan lebih besar dibandingkan dengan non bangunan. Hal tersebut dimaklumi mengingat adanya pembangunan yang cukup gencar di Kabupaten Lombok Utara selama lima tahun terakhir. Kabupaten Lombok Utara sebagai kabupaten baru mekar memang belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai maka pembangunan sarana dan fasilitas umum menjadi prioritas. Tren komposisi bangunan dari tahun ketahun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan komposisi non bangunan. Komposisi bangunan terhadap komponen PMTB pada tahun 2017 mencapai 70,60 persen sedangkan untuk non bangunan mencapai 29,40 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori (miliar Rp)					
a. ADHB	1,60	11,84	10,46	15,90	16,37
b. ADHK	1,35	9,44	6,33	9,88	10,07
Proporsi Terhadap PDRB (%)	0,05	0,36	0,29	0,40	0,38

Sumber : BPS Lombok Utara

Pekembangan perubahan inventori kurun waktu lima tahun cukup berflukatif. Pada tahun 2017 nilai komponen inventori mencapai Rp 16,37 miliar lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai Rp 15,90 miliar. Begitupun adh konstan 2010 fluktusi masih ada pada komponen inventori. Jika ditinjau komposisi terhadap PDRB pengeluaran memang, memang perubahan inventori memiliki kontribusi yang tidak begitu besar yaitu berkisar kurang dari 2 persen. Kontribusi perubahan inventori tahun 2017 mencapai 0,38 persen.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

Produk unggulan di Kabupaten Lombok Utara meliputi hasil pertanian utamanya perkebunan yang sekaligus menjadi komoditas ekspor. Selain itu adanya aktivitas pariwisata secara tidak langsung memacu ekspor baik untuk warga asing/ luar negeri. Ekspor menggambarkan besaran barang dan jasa yang dipasarkan keluar daerah dalam hal ini adalah ke luar Kabupaten Lombok Utara baik antar kabupaten kota, provinsi dan luar negeri. Ekspor yang dikirim ke luar negeri di Lombok Utara terkait dengan kunjungan wisatawan asing yang berlibur di Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara terkenal dengan destinasi wisatawan yang sering dikunjungi oleh wisatwan terutama wisatawan luar negeri.

**Tabel 14. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Lombok Utara,
Tahun 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor (Miliar Rp)					
a. ADHB	735,14	788,01	869,93	937,80	1.046,51
b. ADHK	788,76	683,39	713,77	760,02	833,94
Proporsi Terhadap PDRB (%)	25,20	24,25	24,04	23,64	24,08
Laju Pertumbuhan (%)	(23,93)	(13,36)	4,45	6,48	9,73

Sumber : BPS Lombok Utara

Nilai ekspor Kabupaten Lombok Utra pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016. Hal tersebut mengindikasikan jika produksi unit ekonomi mengalami perkembangan yang cukup baik di Kabupaten Lombok Utara. Besaran ekspor tahun 2017 adalah sebesar Rp 1,04 triliun, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai Rp 937,80 miliar. Hal yang sama juga terjadi jika komponen ekspor dihitung adh konstan 2010. Besaran komponen ekspor adh konstan 2010 pada tahun 2017 adalah Rp 833,94 miliar.

Kontribusi ekspor terhadap PDRB pengeluaran cukup besar. Secara rata - rata kontribusi ekspor di atas 20 persen. Tercatat pada tahun 2017 kontribusi ekspor yaitu mencapai 24,08 persen, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 23,64 persen. Hal tersebut mengindikasikan jika perkembangan yang baik terhadap penjualan barang dan jasa ke luar daerah di Kabupaten Lombok Utara ataupun yang dikonsumsi oleh wisatawan luar negeri.

Laju pertumbuhan ekspor selama kurun lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pertumbuhan komponen ekspor pada tahun 2017 mencapai 9,73 persen, mengalami percepatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 6,48 persen. Pesatnya pertumbuhan ekspor ini mengindikasikan adanya pola perdagangan ke luar daerah Kabupaten Lombok Utara. Hal tersebut kemungkinan didorong oleh harga yang lebih kompetitif di luar daerah jika dibandingkan dengan penjualan di dalam daerah Kabupaten Lombok Utara.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA

Kebutuhan barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi di wilayah Kabupaten Lombok Utara akan menjadi komoditas impor. Komponen impor merupakan komponen pengurang dalam PDRB pengeluaran. Hal tersebut dikarenakan komponen impor merupakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pihak luar. Dengan kata lain barang dan jasa yang dikonsumsi merupakan produksi dari unit produksi yang berasal dari luar daerah atau luar negeri. Barang yang diimpor dari luar negeri seperti mesin mesin dan peralatan yang didatangkan dari luar negeri. Jasa yang diimpor berupa jasa tenaga kerja yang bersal dari tenaga kerja asing.

**Tabel 15. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri
Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor (Miliar Rp)					
a. ADHB	2.283,02	2.527,12	2.648,12	2.740,80	2.818,38
b. ADHK	2.051,81	2.005,53	2.080,23	2.084,38	2.088,61
Proporsi Terhadap PDRB (%)	78,27	77,77	73,19	69,10	64,86
Laju Pertumbuhan (%)	(10,32)	(2,26)	3,72	0,20	0,20

Sumber : BPS Lombok Utara

Dalam kurun waktu lima tahun impor mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 nilai kompoen impor mencapai Rp 2,82 triliun meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,74 triliun. Hal senada juga terjadi jika impor dihitung berdasarkan adh konstan 2010. Nilai impor adh konstan 2010 tahun 2017 mencapai Rp 2,09 triliun sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai Rp 2,08 triliun.

Kontribusi impor terhadap PDRB pengeluaran cukup signifikan. Kontribusi komponen impor selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Hal tersebut secara tidak langsung mengindikasikan jika adanya pengurangan ketergantungan terhadap barang dan jasa dari luar negeri. Kontribusi impor tahun 2017 mencapai 69,10 persen. Sementara kontribusi komponen impor pada tahun 2016 mencapai 69,10 persen

Laju pertumbuhan impor tahun 2017 mencapai mengalami penurunan sebesar 0,20 persen. Fluktuasi dari laju impor sangat tergantung dari banyaknya barang dan jasa yang di konsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Utara yang didatangkan dari luar daerah atau pekerja dari perusahaan luar negeri. Masih tingginya angka impor Lombok Utara megindikasikan jika perlunya meningkatkan kapastas produksi dan variasi produksi dari unit unit produksi di Lombok Utara.

3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Tidak seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan dihasilkan di dalam suatu wilayah. Barang dan jasa yang tidak diproduksi dalam suatu wilayah harus didatangkan dari luar wilayah. Begitu sebaliknya barang dan jasa yang dihasilkan melebihi kebutuhan yang digunakan dalam suatu daerah maka akan diperdagangkan atau dinikmati oleh pihak luar atau diekspor ke luar daerah.

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar daerah menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "**positif**" berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN
2013 - 2017

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita

**Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. ADHB	2.916,86	3.249,53	3.618,13	3.966,45	4.345,43
b. ADHK	2.704,66	2.828,84	2.966,67	3.121,55	3.311,34
PDRB Perkapita (Rp)					
a. ADHB (Rp)	14.036.839	15.464.144	17.045.350	18.500.849	20.069.900
b. ADHK (Rp)	13.015.711	13.462.151	13.976.258	14.559.932	15.293.800
c. Pertumbuhan (%)	2,96	3,43	3,82	4,18	5,04
Jumlah Penduduk (jiwa)	207.800	210.133	212.265	214.393	216.515

Sumber : BPS Lombok Utara

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui potensi besaran PDRB yang bisa dinikmati oleh masing masing orang dalam suatu wilayah adalah PDRB Perkapita. PDRB Perkapita dihitung dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Walaupun sifatnya sangat kasar namun kerap digunakan untuk mengetahui potensi ekonomi yang bisa dinikmati oleh penduduk dalam suatu wilayah. Untuk itu indikator PDRB Perkapita mempunyai peranan yang cukup strategis dalam mengkaji keberhasilan pembangunan dan evaluasi program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Selama lima tahun terakhir perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Utara mengalami perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2017 PDRB perkapita mencapai Rp 20.07 juta. Mengalami perkembangan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai Rp 18,50 juta. Jika dinilai adh konstan maka PDRB Perkapita menunjukkan pertumbuhan riil dari PDRB perkapita. Laju pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2017 mencapai 5,04 persen mengalami percepatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 4,18 persen..

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Penggunaan, yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Indonesia sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor dan kelebihan produk akan dijual ke luar daerah.

Tabel 17. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2013–2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	2.566.095	2.772.480	2.955.306	3.104.908	3.261.005
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	735.138	788.006	869.933	937.797	1.046.513
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	3,49	3,52	3,40	3,31	3,12

Sumber : BPS Lombok Utara

Dalam kurun lima tahun terakhir terjadi peningkatan rasio antara total konsumsi rumah tangga terhadap Ekspor. Besarnya komponen konsumsi rumah tangga terhadap ekspor mengindikasikan banyaknya produksi lokal yang dikonsumsi oleh penduduk di Lombok Utara. Rasio konsumsi rumah tangga terhadap ekspor pada tahun 2017 mencapai 3,12 kali lipat, sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 3,31 kali lipat.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di Kabupaten Lombok Utara digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Sebagai kabupaten yang masih berkembang, investasi fisik memiliki peranan dalam meningkatkan produktivitas dari seluruh unit ekonomi yang ada di Kabupaten Lombok Utara.

Tabel 18. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	2.566.095	2.772.480	2.955.306	3.104.908	3.261.005
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	1.102.951	1.193.587	1.324.562	1.484.953	1.591.688
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	2,33	2,32	2,23	2,09	2,05

Sumber : BPS Lombok Utara

Selama lima tahun terakhir, rasio penggunaan konsumsi RT jika dibandingkan dengan PMTB hampir 2 kali lipat. Kecenderungan rasio tersebut mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 rasio nya mencapai 2,05 kali lipat, lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 2,09 kali lipat. Hal tersebut mengindikasikan jika peningkatan konsumsi RT relatif stabil dengan peningkatan komponen PMTB.

4.4 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 19. Rasio Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	2.566,10	2.772,48	2.955,31	3.104,91	3.261,00
b. LNPRT	30,68	37,29	40,26	43,95	47,92
c. Pemerintah	763,40	973,45	1.065,74	1.119,74	1.200,32
Jumlah	3.360,18	3.783,21	4.061,30	4.268,60	4.509,25
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	2.916,86	3.249,53	3.618,13	3.966,45	4.345,43
Rasio	1,15	1,16	1,12	1,08	1,04

Sumber : BPS Lombok Utara

Jika dibandingkan antara Konsumsi akhir dengan total PDRB maka terlihat jika rasio konsumsi akhir terhadap PDRB mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 rasio konsumsi akhir adalah 1,08. hal tersebut mengindikasikan jika prioritas pengeluaran untuk konsumsi mulai menurun. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya komponen pengeluaran lainnya seperti PMTB dan ekspor..

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan wilayah Kabupaten Lombok Utara. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 20. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2013–2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	735,14	788,01	869,93	937,80	1.046,51
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	1.102,95	1.193,59	1.324,56	1.484,95	1.591,69
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0,67	0,66	0,66	0,63	0,66

Sumber : BPS Lombok Utara

Selama lima tahun terakhir rasio ekspor terhadap PMTB mengalami penurunan. Penurunan tersebut mengindikasikan jika pembiayaan pembentukan barang modal seperti mesin dan fasilitas pendukung lainnya masih cukup tinggi. Peningkatan fasilitas dan mesin nantinya diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan komoditas ekspor di Kabupaten Lombok Utara. Pada tahun 2017 rasio ekspor terhadap PMTB mencapai 0,66, relatif hampir sama jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 0,63.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 21. Rasio PDRB terhadap Impor
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	2.916,86	3.249,53	3.618,13	3.966,45	4.345,43
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	2.283,02	2.527,12	2.648,12	2.740,80	2.818,38
Rasio PDRB terhadap Impor	1,28	1,29	1,37	1,45	1,54

Sumber : BPS Lombok Utara

Secara umum rasio PDRB terhadap impor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 rasio PDRB terhadap impor adalah 1.54, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 1,45. Hal tersebut mengindikasikan ketergantungan Kabupaten Lombok Utara terhadap barang yang diimpor dari luar daerah masih tinggi seiring dengan meningkatnya kebutuhan barang dan jasa masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Namun kedepan diharapkan dengan menurunnya tren rasio terhadap impor ketergantungan akan produk luar semakin berkurang.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 22. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Total Penyediaan</u> PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	2.916,86	3.249,53	3.618,13	3.966,45	4.345,43
%	56,09	56,25	57,74	59,14	60,66
<u>Total nilai Impor ADHB</u> (Miliar Rp)	2.283,02	2.527,12	2.648,12	2.740,80	2.818,38
%	43,91	43,75	42,26	40,86	39,34
<u>Total Permintaan Akhir</u> (Miliar Rp)	5.199,87	5.776,65	6.266,25	6.707,25	7.163,82
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Lombok Utara

Berdasarkan tabel di dapat dilihat jika komponen impor memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap total permintaan akhir. Dari keseluruhan permintaan akhir pada tahun 2017, sebanyak 39,34 persen merupakan barang dan jasa yang berasal dari luar daerah. Total; penyediaan pada tahun 2017 yaitu sebesar 60,66 persen. Tingginya perentase impor terhadap total permintaan mengindikasikan jika tingginya ketergantungan terhadap produk luar daerah. Namun persentase impor terhadap permintaan akhir semakin menurun selama tiga tahun terakhir, dengan kata lain barang kebutuhan sudah mulai memenuhi kebutuhan penduduk.

4.8 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 23. Incremental Capital Output Ratio,
Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2013 - 2017**

Uraian	2013	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	2.704,66	2.828,84	2.966,67	3.121,55	3.311,34
Perubahan (miliar rupiah)	106.867	124.177	137.828	154.877	189.789
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	946,85	972,85	1.050,68	1.116,18	1.159,68
ICOR	8,86	7,83	7,62	7,21	6,11

Sumber : BPS Lombok Utara

Berdasarkan tabel di atas maka terlihat jika ICOR secara umum selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Nilai ICOR Kabupaten Lombok Utara Berkisar 6 sampai dengan 9. ICOR tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 8,86. ICOR pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 mencapai 7,21.

BAB V
PENUTUP

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

1. PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. PDRB menurut pengeluaran menggambarkan pola konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Dalam pembahasannya juga dilengkapi dengan data penunjang seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri, sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang menyeluruh dan mudah dimengerti.
3. Series data yang disajikan adalah lima tahun terakhir yaitu meliputi tahun 2013 s.d 2017, dengan mencantumkan seires data lima tahun diharapkan dapat memeberikan perubahan tentang adanya perubahan dalam kurun waktu lima tahun..
4. Berdasarkan publikasi PDRB Pengeluaran diharapkan dapat diturunkan indikator pelengkap seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia.

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

LAMPIRAN

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 - 2017**

Kategori	2013	2014	2015	2016	2017
	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	2,566,095	2,772,480	2,955,306	3,104,908
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,006,008	1,101,749	1,174,710	1,252,477	1,306,231
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	90,373	96,794	101,573	110,770	117,502
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	557,996	598,389	654,265	681,347	716,128
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	251,370	265,674	280,236	307,239	330,831
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	569,269	615,441	641,966	641,086	669,331
1.f. Hotel dan Restoran	3,555	3,735	4,047	4,428	4,821
1.g. Lainnya	87,523	90,697	98,509	107,561	116,161
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	30,681	37,286	40,259	43,955	47,924
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	763,403	973,449	1,065,735	1,119,737	1,200,322
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	1,102,951	1,193,587	1,324,562	1,484,953	1,591,688
4.a. Bangunan	771,128	824,161	908,895	1,034,518	1,123,805
4.b. Non-Bangunan	331,822	369,426	415,667	450,435	467,883
5. Perubahan Inventori	1,603	11,838	10,458	15,901	16,368
6. Ekspor	735,138	788,006	869,933	937,797	1,046,513
7. Impor	2,283,016	2,527,119	2,648,122	2,740,799	2,818,384
PDRB	2,916,855	3,249,527	3,618,131	3,966,453	4,345,434

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 - 2017**

Kategori	2013	2014	2015	2016	2017
	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.i.)	2,318,573	2,403,331	2,496,375	2,533,316
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	919,868	959,420	1,001,174	1,014,633	1,025,421
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	85,473	88,689	89,952	92,531	94,367
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	513,862	530,675	553,388	558,199	562,201
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	219,739	227,254	233,571	240,168	249,138
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	500,788	518,305	537,169	545,874	562,458
1.f. Hotel dan Restoran	2,941	3,031	3,153	3,263	3,432
1.g. Lainnya	75,903	75,958	77,968	78,647	81,971
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	27,378	30,436	32,144	33,915	35,653
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	673,565	734,918	747,601	752,610	781,623
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	946,848	972,854	1,050,677	1,116,181	1,159,685
4.a. Bangunan	663,394	683,362	737,879	796,956	837,158
4.b. Non-Bangunan	283,454	289,491	312,798	319,225	322,527
5. Perubahan Inventori	1,352	9,441	6,334	9,884	10,067
6. Ekspor	788,759	683,391	713,772	760,018	833,936
7. Impor	2,051,810	2,005,528	2,080,232	2,084,377	2,088,613
PDRB	2,704,665	2,828,842	2,966,670	3,121,548	3,311,337

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 - 2017

Kategori					
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	87.97	85.32	81.68	78.28	75.04
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	34.49	33.90	32.47	31.58	30.06
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3.10	2.98	2.81	2.79	2.70
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	19.13	18.41	18.08	17.18	16.48
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	8.62	8.18	7.75	7.75	7.61
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	19.52	18.94	17.74	16.16	15.40
1.f. Hotel dan Restoran	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11
1.g. Lainnya	3.00	2.79	2.72	2.71	2.67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.05	1.15	1.11	1.11	1.10
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	26.17	29.96	29.46	28.23	27.62
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	37.81	36.73	36.61	37.44	36.63
4.a. Bangunan	26.44	25.36	25.12	26.08	25.86
4.b. Non-Bangunan	11.38	11.37	11.49	11.36	10.77
5. Perubahan Inventori	0.05	0.36	0.29	0.40	0.38
6. Ekspor	25.20	24.25	24.04	23.64	24.08
7. Impor	78.27	77.77	73.19	69.10	64.86
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 - 2017**

Kategori					
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	85.72	84.96	84.15	81.16	77.88
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	34.01	33.92	33.75	32.50	30.97
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3.16	3.14	3.03	2.96	2.85
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan	19.00	18.76	18.65	17.88	16.98
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	8.12	8.03	7.87	7.69	7.52
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	18.52	18.32	18.11	17.49	16.99
1.f. Hotel dan Restoran	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10
1.g. Lainnya	2.81	2.69	2.63	2.52	2.48
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.01	1.08	1.08	1.09	1.08
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	24.90	25.98	25.20	24.11	23.60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	35.01	34.39	35.42	35.76	35.02
4.a. Bangunan	24.53	24.16	24.87	25.53	25.28
4.b. Non-Bangunan	10.48	10.23	10.54	10.23	9.74
5. Perubahan Inventori	0.05	0.33	0.21	0.32	0.30
6. Ekspor	29.16	24.16	24.06	24.35	25.18
7. Impor	75.86	70.90	70.12	66.77	63.07
PDRB	100	100	100	100	100

**Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 - 2017**

Kategori	2013	2014	2015	2016	2017
	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.i.)	8.33	8.04	6.59	5.06
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3.33	9.52	6.62	6.62	4.29
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	6.23	7.11	4.94	9.05	6.08
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12.19	7.24	9.34	4.14	5.10
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	7.38	5.69	5.48	9.64	7.68
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	14.71	8.11	4.31	(0.14)	4.41
1.f. Hotel dan Restoran	14.94	5.06	8.34	9.43	8.88
1.g. Lainnya	10.34	3.63	8.61	9.19	7.99
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	11.97	21.53	7.97	9.18	9.03
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.32	27.51	9.48	5.07	7.20
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	6.74	8.22	10.97	12.11	7.19
4.a. Bangunan	4.87	6.88	10.28	13.82	8.63
4.b. Non-Bangunan	11.36	11.33	12.52	8.36	3.87
5. Perubahan Inventori	(94.83)	638.60	(11.65)	52.05	2.93
6. Ekspor	41.09	7.19	10.40	7.80	11.59
7. Impor	15.48	10.69	4.79	3.50	2.83
PDRB	6.60	11.41	11.34	9.63	9.55

**Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 - 2017**

Kategori	2013	2014	2015	2016	2017
	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.i.)	4.57	3.66	3.87	1.48
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1.92	4.30	4.35	1.34	1.06
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4.96	3.76	1.42	2.87	1.98
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6.57	3.27	4.28	0.87	0.72
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5.06	3.42	2.78	2.82	3.73
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7.08	3.50	3.64	1.62	3.04
1.f. Hotel dan Restoran	7.53	3.05	4.05	3.49	5.16
1.g. Lainnya	6.00	0.07	2.65	0.87	4.23
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6.04	11.17	5.61	5.51	5.13
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.19	9.11	1.73	0.67	3.85
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	3.33	2.75	8.00	6.23	3.90
4.a. Bangunan	4.76	3.01	7.98	8.01	5.04
4.b. Non-Bangunan	0.13	2.13	8.05	2.05	1.03
5. Perubahan Inventori	(95.51)	598.35	(32.91)	56.04	1.85
6. Ekspor	58.73	(13.36)	4.45	6.48	9.73
7. Impor	17.39	(2.26)	3.72	0.20	0.20
PDRB	4.11	4.59	4.87	5.22	6.08

**Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 - 2017**

Kategori	2013	2014	2015	2016	2017
	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	128.34	138.66	147.80	155.28
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	117.89	129.11	137.66	146.78	153.08
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	122.61	131.32	137.81	150.29	159.42
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	135.39	145.19	158.74	165.32	173.75
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	137.97	145.82	153.82	168.64	181.59
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	137.19	148.32	154.71	154.50	161.31
1.f. Hotel dan Restoran	144.20	151.50	164.13	179.61	195.56
1.g. Lainnya	144.08	149.30	162.16	177.07	191.22
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	130.94	159.13	171.81	187.58	204.52
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	127.18	162.17	177.54	186.54	199.97
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	136.21	147.40	163.58	183.39	196.57
4.a. Bangunan	128.76	137.62	151.77	172.74	187.65
4.b. Non-Bangunan	157.36	175.20	197.12	213.61	221.89
5. Perubahan Inventori	5.36	39.57	34.96	53.15	54.71
6. Ekspor	81.71	87.58	96.69	104.23	116.32
7. Impor	114.54	126.79	132.86	137.51	141.40
PDRB	123.11	137.15	152.70	167.41	183.40

**Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 - 2017**

Kategori	2013	2014	2015	2016	2017
	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.i.)	115.96	120.20	124.85	126.70
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	107.80	112.43	117.33	118.90	120.17
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	115.97	120.33	122.04	125.54	128.03
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	124.68	128.76	134.27	135.44	136.41
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	120.61	124.74	128.20	131.82	136.75
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	120.69	124.91	129.46	131.55	135.55
1.f. Hotel dan Restoran	119.28	122.92	127.90	132.36	139.19
1.g. Lainnya	124.95	125.04	128.35	129.47	134.94
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	116.84	129.89	137.18	144.74	152.16
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	112.21	122.43	124.55	125.38	130.21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	116.93	120.14	129.75	137.84	143.22
4.a. Bangunan	110.77	114.11	123.21	133.07	139.79
4.b. Non-Bangunan	134.42	137.29	148.34	151.39	152.95
5. Perubahan Inventori	4.52	31.56	21.17	33.04	33.65
6. Ekspor	87.67	75.96	79.33	84.47	92.69
7. Impor	102.94	100.62	104.37	104.57	104.79
PDRB	114.15	119.39	125.21	131.75	139.76

**Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 - 2017**

Kategori					
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	110.68	115.36	118.38	122.56	126.45
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	109.36	114.83	117.33	123.44	127.38
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	105.73	109.14	112.92	119.71	124.52
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	108.59	112.76	118.23	122.06	127.38
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	114.39	116.91	119.98	127.93	132.79
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	113.67	118.74	119.51	117.44	119.00
1.f. Hotel dan Restoran	120.89	123.25	128.33	135.70	140.50
1.g. Lainnya	115.31	119.40	126.35	136.76	141.71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	112.07	122.51	125.25	129.60	134.42
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	113.34	132.46	142.55	148.78	153.57
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	116.49	122.69	126.07	133.04	137.25
4.a. Bangunan	116.24	120.60	123.18	129.81	134.24
4.b. Non-Bangunan	117.06	127.61	132.89	141.10	145.07
6. Ekspor	93.20	115.31	121.88	123.39	125.49
7. Impor	111.27	126.01	127.30	131.49	134.94
PDRB	107.85	114.87	121.96	127.07	131.23

**Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 - 2017**

Kategori					
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.i.)	3.60	4.23	2.62	3.53	3.17
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1.38	5.00	2.18	5.21	3.19
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1.21	3.22	3.46	6.01	4.01
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5.28	3.84	4.85	3.24	4.36
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2.21	2.20	2.63	6.62	3.80
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7.12	4.46	0.65	(1.73)	1.33
1.f. Hotel dan Restoran	6.89	1.96	4.12	5.75	3.53
1.g. Lainnya	4.09	3.55	5.81	8.25	3.62
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5.59	9.31	2.24	3.48	3.71
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.08	16.87	7.62	4.37	3.22
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	3.30	5.32	2.75	5.53	3.17
4.a. Bangunan	0.10	3.75	2.13	5.38	3.41
4.b. Non-Bangunan	11.21	9.01	4.13	6.18	2.81
6. Ekspor	(11.12)	23.72	5.70	1.24	1.70
7. Impor	(1.63)	13.25	1.03	3.29	2.62
PDRB	2.38	6.51	6.17	4.19	3.28

DAFTAR PUSTAKA

<https://lombokutarakab.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Statistik Industri, berbagai seri*, Jakarta.
5. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.

14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
16. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
17. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
18. _____, *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
19. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993

DATA MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara
Jl. Raya Gangga - Bayan, Gangga
Email : bps5208@bps.go.id
Lombok Utara